

1. KERJASAMA DAERAH

Urusan Kerjasama merupakan rangkaian proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Proses pembangunan tidak selalu dilaksanakan dalam bentuk idealnya, karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia maupun secara finansial. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain maupun dengan pemerintah daerah lain menjadi salah satu solusi agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan memiliki cakupan yang lebih luas. Perangkat daerah yang melaksanakan Fungsi Lain Urusan Kerjasama adalah Dinas Sosial, Setda Bagian Perekonomian dan Bappeda Kabupaten Wonosobo.

a. Program dan Kegiatan

Kegiatan kerjasama daerah yang telah dilakukan pada tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 diantaranya :

Tabel III.F.1.1
Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Kerjasama Daerah Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung		
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (KKN)	50.000.000,00	29.480.400,00
2	Temu Bisnis	200.000.000,00	193.510.000,00
3	Fasilitasi kerjasama bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana, dan pemerintahan	50.000.000,00	45.350.500,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi merupakan fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh para mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Wonosobo. Berbagai kegiatan KKN yang telah dilakukan oleh para mahasiswa berbagai perguruan tinggi secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi lokasi KKN dan diharapkan bisa mendukung pencapaian berbagai target dan tujuan pembangunan daerah.

Bentuk fasilitasi berupa konsultasi dalam penentuan lokasi KKN, penentuan program kegiatan KKN, serta dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi KKN. Lokasi KKN ditentukan bersama antara pihak perguruan tinggi dan juga Pemkab Wonosobo yaitu dengan memperhatikan program kerja KKN dan juga disesuaikan dengan program-program pembangunan daerah. Untuk KKN tahun 2017 wilayah yang

direkomendasikan menjadi lokasi KKN adalah desa-desa yang masuk dalam kategori desa dengan angka kemiskinan sedang dan tinggi, dengan harapan kegiatan KKN yang dilaksanakan bisa turut membantu mengurangi angka kemiskinan yang menjadi salah satu agenda utama pembangunan di Wonosobo. Selama tahun 2017 beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan KKN di Wonosobo diantaranya : STEI Hamfara, UNS Surakarta, UGM Yogyakarta, UNNES Semarang, Unika Soegijapranata Semarang, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan UNSIQ Wonosobo.

Pemkab Wonosobo juga memiliki TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) yang selama tahun 2017 terdapat beberapa Perjanjian Kerjasama Daerah yaitu kerjasama dengan daerah lain sejumlah 2 (dua) buah yaitu dengan Kab. Batang dan Kota Tasikmalaya dan sejumlah 14 (empat belas) kerjasama dengan pihak ketiga. Berbagai bentuk kerjasama dengan pihak ketiga di atas pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan berbagai tujuan pembangunan daerah dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kegiatan temu bisnis yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian merupakan bentuk kerjasama pemkab dengan berbagai pihak lain, dimaksudkan untuk mempertemukan para stake holders sektor pertanian, industri dan sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo untuk bersinergi dalam mengembangkan perekonomian Kabupaten Wonosobo berbasis potensi serta sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kegiatan melibatkan pelaku usaha masing-masing sektor, pemerintah yang diwakili oleh OPD yang terkait, organisasi profesi dan calon buyer.

Pada akhir tahun 2017 dilaksanakan dua agenda kegiatan kerjasama, yaitu Workshop Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan di RM Sari Rasa dan Pertemuan Diaspora Wonosobo di Jakarta. Workshop kemitraan mengundang narasumber berbagai pihak yang selama ini telah bekerjasama dengan Pemkab Wonosobo, diantaranya PT Tirta Investama (Aqua) dan PT Pertamina. Workshop dilanjutkan dengan Focus Group Discussion membahas format ideal kerjasama pembangunan berbagai pihak. Pertemuan Diaspora Wonosobo merupakan pertemuan para warga Wonosobo yang telah merantau ke berbagai daerah, dimaksudkan untuk menghimpun berbagai sumber daya, ide dan pemikiran serta jejaring yang bisa disumbangkan dalam proses pembangunan Kabupaten Wonosobo.

c. Capaian Kinerja Kerjasama Daerah

Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak lain merupakan langkah strategis mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan banyaknya peluang kerjasama yang menguntungkan. Sejauh ini kerjasama masih dilakukan secara sporadis oleh masing-masing sektor maupun OPD dan belum ada format kerjasama yang integratif antar berbagai sektor. Untuk mencapai manfaat yang lebih optimal perlu diformulasikan kerjasama Pemkab Wonosobo dengan pihak-pihak lain secara integral antar berbagai sektor sehingga manfaat bagi pembangunan Wonosobo bisa lebih dapat

III.F.1.Fungsi Lain Kerjasama Daerah

dirasakan.

Kerjasama daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Oleh karenanya kegiatan kerjasama daerah dianggap berhasil ketika kerjasama tersebut menghasilkan efisiensi dan efektivitas publik maupun menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan pihak yang diajak kerjasama tersebut.

Berbagai upaya kerjasama yang telah dilakukan selama tahun 2017 perlu dievaluasi secara berkala dan menyeluruh untuk dapat menyusun format kerjasama yang lebih integratif dan menyeluruh dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berpotensi melakukan kerjasama juga perlu didata dan dikaji ulang sehingga kerjasama yang akan dilakukan bisa lebih optimal.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.F.1.2
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Kerjasama Daerah

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya yang Perlu Dilakukan
1.	Kerjasama dengan daerah yang berbatasan langsung terutama yang memiliki eksternalitas baik ekonomi maupun sosial secara lintas daerah belum dilakukan secara optimal.	Perlu digali dan dikaji berbagai kerjasama dengan daerah lain yang berbatasan secara langsung yang memiliki eksternalitas lintas daerah, yaitu terutama dengan Kabupaten Temanggung dan Banjarnegara agar diperoleh manfaat yang lebih besar.
2.	Beberapa kerjasama dilaksanakan secara mandiri oleh OPD yang menangani dan tidak berkoordinasi dengan TKKSD sehingga informasi mengenai manfaat dan bentuk kerjasama kurang tersampaikan kepada banyak pihak.	Mengoptimalkan fungsi koordinasi yang dimiliki oleh TKKSD sehingga kerjasama dengan berbagai pihak membawa manfaat yang besar bagi proses pembangunan daerah.
3.	Terdapat peluang kerjasama dengan daerah lain yang memiliki kelebihan atau keunggulan dalam pengelolaan pembangunan	Studi banding yang dilakukan secara mandiri oleh beberapa OPD seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan daerah yang memiliki

III.F.1.Fungsi Lain Kerjasama Daerah

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya yang Perlu Dilakukan
		keunggulan dalam bidang-bidang tertentu.
4.	Terdapat peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkualitas tetapi masih belum tergarap dengan baik.	Perlu pendataan ulang dan penjajagan peluang kerjasama dengan berbagai pihak yang berpeluang untuk melakukan kerjasama.